



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270
Telepon (021) 57946042, 316-9804, Faksimil (021) 3101728
www.ristekdikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/E/KPT/2018

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I
TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 5 Mei 2018 dan Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.
- KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah menerbitkan minimal 1 (satu) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau diturunkan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

TTD.

Syarip Hidayat
NIP 197306101997031004

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 21/E/KPT/2018
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL
ILMIAH PERIODE I TAHUN 2018

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2018

Peringkat	No	Nama Jurnal	ISSN	Penerbit
Peringkat 1 (Satu)	1	Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis	19782993	Departement of Chemical Engineering, Diponegoro University
	2	IJAL (Indonesian Journal of Applied Linguistics)	25026747	Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia
	3	Indonesian Journal of Biotechnology	20892241	Pusat Studi Bioteknologi dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
	4	Indonesian Journal of Chemistry	24601578	Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada
	5	Journal of Indonesian Islam	23556994	Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) dan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
	6	Medical Journal of Indonesia	22528083	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
	7	TELKOMNIKA: Telecommunication Computing Electronics and Control	23029293	Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
	8	The Indonesian Biomedical Journal	23559179	Secretariat of The Indonesian Biomedical Journal
Peringkat 2 (Dua)	1	Agro Ekonomi	25411616	Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada
	2	Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam	25286617	Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
	3	Al-Albab	25028340	Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
	4	Al-Ulum	24428213	LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo
	5	Amerta	25498908	Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
	6	Analisa: Journal of Social Science and Religion	24433853	Religious Research and Development Ministry of Religious Affairs Semarang Indonesia

		Business		
	177	Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	25027921	Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
	178	Squalen Bulletin of Marine and Fisheries Postharvest and Biotechnology	24069272	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, KKP
	179	STIPM (STI Policy and Management) Journal	25025996	Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, LIPI
	180	Teknologi Dirgantara	25977849	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
	181	Teknologi Indonesia	23031913	UPT Balai Informasi Teknologi, LIPI
	182	Trikonomika: Jurnal Ekonomi	23557737	Badan Penerbit Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan
	183	Tsaqafah	24600008	Universitas Darussalam Gontor
	184	Universa Medicina	24072230	Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
	185	Urania : Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir	25280473	Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir, BATAN
	186	Vektora : Jurnal Vektor dan Reservoir Penyakit	23548789	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
	187	Wartazoa : Buletin Ilmu Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia	23546832	Puslitbang Peternakan, Kementerian Pertanian
	188	Widyaparwa	25281089	Balai Bahasa Yogyakarta, Kemdikbud
	189	Widyariset	24610976	Pusbindiklat Peneliti, LIPI
Peringkat 3 (Tiga)	1	ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation	2460724X	Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, FIK, Universitas Negeri Semarang
	2	AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan	25499912	Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
	3	AGRIC	25499343	Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
	4	Al-Kimia	25499335	Jurusan Kimia Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
	5	Andalas Journal of International Studies	23559500	Universitas Andalas

129	Lisanudhad : Jurnal Bahasa, Pembelajaran, dan Sastra Arab	25276360	Tarbiyah UNIDA Gontor
130	Madah : Jurnal Bahasa dan Sastra	25809717	Balai Bahasa Riau
131	Majalah Ilmiah Biologi Biosfera: A Scientific Journal	25282050	Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman
132	Majalah Kesehatan	19078803	Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
133	Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam	25285661	Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
134	Media Ekonomi dan Manajemen	25034464	Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang
135	Media Gizi Indonesia	25408410	Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
136	Media Konservasi	25026313	Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
137	Media Trend: Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan	24607649	Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo
138	Medical Laboratory Technology Journal	24610879	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Jurusan Analisis Kesehatan
139	Medicina : Jurnal Ilmiah Kedokteran	25408321	Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
140	Metalurgi	24433926	Pusat Penelitian Metalurgi dan Material - LIPI
141	Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan	2503457X	Universitas Pendidikan Indonesia
142	MNJ (Malang Neurology Journal)	24425001	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis I Neurologi Fakultas Kedokteran - Universitas Brawijaya
143	Multitek Indonesia : Jurnal Ilmiah	25793497	Universitas Muhammadiyah Ponorogo
144	MUWAZAH : Jurnal Kajian Gender	25025368	PSG IAIN Pekalongan
145	Nurseline Journal	2541464X	Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember
146	Odonto : Dental Journal	24604119	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung
147	Operations and Supply Chain Management: An International Journal	19793871	Laboratorium Logistik dan Supply Chain Management - Jurusan Teknik Industri ITS Surabaya
148	Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu	23375418	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



PANDECTA : JURNAL PENELITIAN ILMU HUKUM (RESEARCH LAW JOURNAL)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

P-ISSN : 19078919 <> E-ISSN : 23375418 Subject Area : Social

1.91803
Impact Factor

1229
Google Citations

S2
Current Accreditation

Google Scholar Garuda Website Editor URL

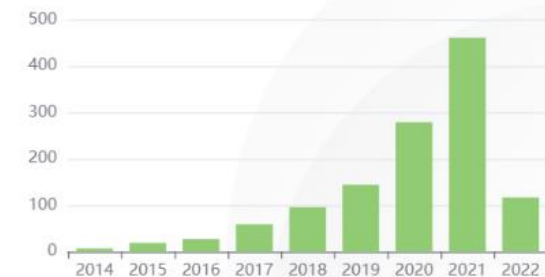
History Accreditation



Google Scholar Garuda

Eksplorasi Manfaat Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata

Citation Per Year By Google Scholar



Journal By Google Scholar

	All	Since 2017
Citation	1229	1157
h-index	16	15
i10-index	35	30

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

Home > Pandecta Research Law Journal

Pandecta Research Law Journal

Pandecta Research Law Journal was created to be a means of dissemination of the results of legal research for all researchers who have an interest in the field. Through the dissemination of research results in the journal is expected to grow a network of researchers in the field of law according to their research interests. In addition, the dissemination of the research is expected to develop the jurisprudence of the field of interest.

The scope of this journal is the publication of research in the field of law, both written by researchers from the fields of law or other parties whose study is the law. This journal is published twice a year, that is on JUNE AND DECEMBER.

PANDECTA - Research Law Journal indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine, JournalTOCs, Miami University Libraries, Mercyhurst University, Wayne State University, Western Theological Seminary, University College Cork, Ireland, University of Utah, University of Saskatchewan, Scholastica, Mendeley, IPI Portal Garuda, Crossref DOI

Since the first edition, this Journal is published twice in January and July every year until the second edition of 2014 it was changed to June and December every year.



Online Submissions

Already have a Username/Password for Pandecta: Research Law Journal?

GO TO LOGIN

Need a Username/Password?

GO TO REGISTRATION

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.



Announcements

No announcements have been published.

[More Announcements...](#)

ISSN: 2337-5418

USER

Username

Password

☐ Remember me



SINTA 2

ABOUT THE JOURNAL

AIMS AND SCOPE

EDITORIAL BOARDS

REVIEWERS

INDEXING & ABSTRACTING

OPEN ACCESS POLICY

PUBLISHING SYSTEM

CONTACT

FOR AUTHORS

AUTHOR GUIDELINES

AUTHOR RESPONSIBILITIES

ONLINE SUBMISSION

PUBLICATION ETHICS & MALPRACTICE STATEMENTS

COPYRIGHT

ARTICLE TEMPLATE

REVIEWER GUIDELINES

ONLINE SUBMISSION GUIDELINES

COLLABORATE WITH



APHKI



Pandecta

Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
(Research Law Journal)

E-ISSN 2337-5418



[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

Editorial Team

Chief-Editor

1. Waspiah Waspiah, (Scopus ID: 57218096155) Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Managing Editor

1. Ayup Suran Ningsih, [SCOPUS ID 57215580621] Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
2. diandra preludio ramada, FH UNNES

Editorial Assistant

1. Widiyanto Widiyanto, [Scopus ID: 57201671173] Universitas Terbuka, Indonesia

ISSN: 2337-5418

USER

Username

Password

☐ Remember me



SINTA 2

ABOUT THE JOURNAL

[AIMS AND SCOPE](#)

[EDITORIAL BOARDS](#)

[REVIEWS](#)

[INDEXING & ABSTRACTING](#)

[OPEN ACCESS POLICY](#)

[PUBLISHING SYSTEM](#)

[CONTACT](#)

FOR AUTHORS

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[AUTHOR RESPONSIBILITIES](#)

[ONLINE SUBMISSION](#)

[PUBLICATION ETHICS & MALPRACTICE STATEMENTS](#)

[COPYRIGHT](#)

[ARTICLE TEMPLATE](#)

[REVIEWER GUIDELINES](#)

[ONLINE SUBMISSION GUIDELINES](#)

COLLABORATE WITH



APHKI

Visitors



[View My Stats](#)

00252176

[View My Stats](#)

[View Pandecta Stats](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

Home > Archives > Vol 12, No 2 (2017)

Vol 12, No 2 (2017)

December

Table of Contents

Articles

Rekonseptualisasi Hukum Indonesia
Sulaiman Sulaiman

PDF
98-110

Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara
Hartana Hartana

PDF
111-134

Politik Hukum Kebijakan Peraturan Kesejahteraan Keluarga di Kota Semarang
Mira Sari Valentina

PDF
135-151

Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional
Jawahir Thontowi

PDF
152-164

Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Hardianto Djanggih, Salle Salle

PDF
165-172

Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amendemen UUD NRI 1945
M. Yasin al Arif

PDF
173-182

Model Percepatan Komersialisasi Paten Sederhana pada Dunia Industri
Waspiah Waspiah

PDF
183-202

Effect of Positivism in Clinical Legal Education
FX Adji Samekto

PDF
203-207

Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Bima Satrio Husodo, Sihabudin Sihabudin, Eny Harjati

PDF
208-224

ISSN: 2337-5418

USER

Username

Password

☐ Remember me



SINTA 2

ABOUT THE JOURNAL

AIMS AND SCOPE

EDITORIAL BOARDS

REVIEWS

INDEXING & ABSTRACTING

OPEN ACCESS POLICY

PUBLISHING SYSTEM

CONTACT

FOR AUTHORS

AUTHOR GUIDELINES

AUTHOR RESPONSIBILITIES

ONLINE SUBMISSION

PUBLICATION ETHICS & MALPRACTICE STATEMENTS

COPYRIGHT

ARTICLE TEMPLATE

REVIEWER GUIDELINES

ONLINE SUBMISSION GUIDELINES

COLLABORATE WITH



APHKI



Effect of Positivism in Clinical Legal Education

FX. Adji Samekto ✉

Faculty of Law Diponegoro University, Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.12572>

Info Artikel

Article History:

Received : June 2017

Accepted: December 2017

Published: December 2017

Keywords:

clinical legal education;
legal procedure; modern legal
system; positivism

Abstrak

Saat ini, seiring dengan kompleksnya masalah masyarakat, karakter utama hukum modern adalah bersifat rasional. Rasionalitas dicirikan oleh sifat peraturan prosedural hukum. Prosedur, sehingga menjadi dasar hukum yang penting untuk menetapkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada membicarakan keadilan itu sendiri. Pendidikan hukum, lebih cenderung menghasilkan praktisi profesional. Praktisi hukum yang dihasilkan adalah pelaku hukum yang diharapkan membuat keputusan yang salah dan mana yang benar berdasarkan ketentuan undang-undang. Tulisan ini membahas tentang hubungan metode Clinical Legal Education (CLE) dengan Alumni pendidikan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan kepada hukum positif, namun juga tetap berpedoman pada etika dan upaya mencapai keadilan. Metode yang digunakan untuk penulisan makalah ini adalah penelitian sosio-legal dengan analisis induktif.

Abstract

At present, along with the complexity of the problems of people and society, the main character of modern law is a rational nature. Rationality is characterized by the nature of a procedural rule of law. Procedure, thereby becoming an important legal basis to establish what is called justice, even the procedure becomes more important than talking about justice itself. Legal education, thus more likely to produce professional practitioners. The resulting legal practitioners are legal actors who are expected to make a decision which side is wrong and what is right under the provisions of the law. This paper discusses on the relationship of CLE method to the result of the Law degree who is not only give priority to the compliance procedure as positive law, but also still guided ethics and efforts to achieve justice. The method used for writing this paper is the socio legal research with inductive analysis. Thus, the fact that occurred in the law enforcement practices will be a major premise and provide input and analysis in this paper.





Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Hardianto Djangih^{✉1}, Salle²

¹Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, Sulawesi Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Tengah, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.11677>

Info Artikel

Article History:

Received : December 2017;

Accepted: December 2017;

Published: December 2017

Keywords:

land; development; local government

Abstrak

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Metode Penelitian digunakan Metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan daerah berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah, aplikasinya harus bersinergi dengan program pemerintah pusat. Jika eksistensi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat.

Abstract

Land is a gift of God Almighty for the people, the nation and the State of Indonesia, which must be cultivated, utilized, and used for the greatest prosperity of the people. This article examines the land procurement oriented to the creation of legal certainty of land procurement for local government. Methods Research used normative research methods with statutory approach and analytical or conceptual approach. The results of research indicate that local government has the right and authority to arrange and manage its own regional government affairs according to the principles of regional autonomy, especially in terms of land acquisition for the implementation of development for the public interest. However, the authority given to each local government, the application must be in synergy with the central government program. If the existence of local government can not be separated from the central government.



Effect of Positivism in Clinical Legal Education

by Fx. Adji Samekto

Submission date: 29-Dec-2022 10:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 1987204138

File name: Effect_of_Positivism.pdf (132.35K)

Word count: 3135

Character count: 16547



Volume 12, Nomor 1, June 2017

Pandecta

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>



Effect of Positivism in Clinical Legal Education

FX. Adji Samekto ✉

Faculty of Law Diponegoro University, Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.12572>

Info Artikel

Article History:

Received : June 2017

Accepted: December 2017

Published: December 2017

Keywords:

clinical legal education;
legal procedure; modern legal
system; positivism

Abstrak

5at ini, seiring dengan kompleksnya masalah masyarakat, karakter utama hukum modern adalah bersifat rasional. 6sionalitas dicirikan oleh sifat peraturan prosedural hukum. Prosedur, sehingga menjadi dasar hukum yang penting untuk menetapkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada membicarakan keadilan itu sendiri. Pendidikan hukum, lebih cenderung menghasilkan praktisi profesional. Praktisi hukum yang dihasilkan adalah pelaku hukum yang diharapkan membuat keputusan yang salah dan mana yang benar berdasarkan ketentuan undang-undang. Tulisan ini membahas tentang hubungan metode Clinical Legal Education (CLE) dengan Alumni pendidikan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan kepada hukum positif, namun juga tetap berpedoman pada etika dan upaya mencapai keadilan. Metode yang digunakan untuk penulisan makalah ini adalah penelitian sosio-legal dengan analisis induktif.

Abstract

At present, along with the complexity of the problems of people and society, the main character of modern law is a rational nature. Rationality is characterized by the nature of a procedural rule of law. Procedure, thereby becoming an important legal basis to establish what is called justice, even the procedure becomes more important than talking about justice itself. Legal education, thus more likely to produce professional practitioners. The resulting legal practitioners are legal actors who are expected to make a decision which side is wrong and what is right under the provisions of the law. This paper discusses on the relationship of CLE method to the result of the Law degree who is not only give priority to the compliance procedure as positive law, but also still guided ethics and efforts to achieve justice. The method used for writing this paper is the socio legal research with inductive analysis. Thus, the fact that occurred in the law enforcement practices will be a major premise and provide input and analysis in this paper.



Address : JL. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang
E-mail : adjisamekto@yahoo.com

© 2017 Universitas Negeri Semarang
ISSN 1907-8919 (Cetak)
ISSN 2337-5418 (Online)

1. Introduction

Entering the XVII century the influence of religion is really backwards because of the development of rationalism philosophy. This philosophical view that human reason is the only source of civilization and human progress. Philosophical rationalism adopted the view that God did not interfere in the events in this world. In the view of philosophy of rationalism, science is the only important thing for human progress. In the early seventeenth century, science is seen as a natural science. The development of this knowledge is obtained from the facts, which were collected through observations and findings can be repeated indefinitely. The result will always be the same wherever the research is done. The development of rationalism philosophy is part of human effort to understand nature in a more rational, objective, without prejudice. He refused anything metaphysically analyzed, reject teaching that can not be proved scientifically / science.

Justification for the view above, can be based on founder of scientific evaluation Francis Bacon from England, Rene D'Cartes from France and Galileo Galilei from Italia. They adopt that nature and natural objects do not have souls like humans, and therefore to know, things should be examined in an impersonal, that is separated from the mystical values, theology, but based on ratio reason and experience. The view is then gave birth to the idea that science and scientific thinking should be value free (Hartono, 1991:10). This is what in the world is known as the foundation of "Modernism". Modernism philosophy was dominating the ideas which developed in the XVII century until the early XX century.

Modernism has encouraged the utilization of ratio and reasonable that is so strong. The thoughts or works based on the utilization ratio and reasonable were so admired. This motivated the rapid progress of science and technology in the era of enlightenment. The development of science and technology which are based on observations and actual experiences are believed to provide much benefit because it is based on empirical evidence, objectively and all described based on

the relationship of symptoms to one another is no longer on the teachings derived from religious scripture. Science (especially natural sciences) and the scientific method were greatly admired. Began to develop the view that the right is the real (concrete). This view underlies the birth of positivism philosophy, that the development is very fast in the era of century XVIII - XIX.

Positivism philosophy based on something real, tangible, concrete, not based on metaphysical system. Philosophy of positivism is not about to explain the essence, since essence is something abstract. The essence can be related to the value and interpretation, something invisible. Therefore the positivism does not explain the essence. Philosophy of positivism - *once again* - only basing on the fact and only use the scientific method.

The school of positivism contains **basic values** drawn from natural science tradition, which **places the** phenomenon under study as an object that can be controlled, be generalized so that the symptoms in the future can be predicted (Bonaventura de Sousa Santos, 1996:14-15). School of positivism start from the assumption that the natural sciences is the only science that is universally valid. Based on this assumption then, although there are differences between natural phenomena with social phenomena, considered to be always possible to study social phenomena in the natural science approach. Santos said that these symptoms appear such as in the opinion of Montesquieu that, man-made legal system can not be separated from the natural law.

The dominance of positivism paradigm in natural science that was later adopted in the social sciences lead to a way of thinking as if social phenomena must be understood by an impersonal method, neutral and objective, and "the formula" is always the same everywhere regardless of space and time.

Max Weber, a character who developed sociology in the early XX century continue the thought method of Auguste Comte. According to Auguste Comte sociology was a science that adopted empirical approaches and can not break away from the attitude of

naturalism. Empirical approach in the sociology is evident from the ideas of figures of the early sociologist : Max Weber and Eugen Erlich. It is therefore not surprising that Max Weber's views about the law: rule of law are the facts of reality that emerges from the struggle in the development of symptoms that are cause and effect. The law in fact exist in the community is one element of social life. Weber's view about this law is a view of the law from the sociology perspective is based on empirical approaches. This is the classical view that in the present (XXI century) experienced significant changes.

2. Effect of Positivism in Legal Doctrine

Because of the strong influence of the paradigm of positivism, then modern law scientification has also begun to liberate themselves from the ancient orders, especially the effects of theology, so the law becomes very forward in thinking rationally. So positivism not only get in on the areas of society like sociology, but also in the field of law.

If positivism in sociology see the law as a mere social phenomenon, then positivism in legal doctrine see the law as a symptom of its own. The emergence of norms that should apply and that should not apply comes from the existence of certain values. So the law is seen as the embodiment of certain values. This thought leads us to study what should be legal to realize those values. For example what should be done by law to fulfill the justice value. This has been a hallmark of legal studies, and differentiate it from other social studies.

Empirical approach that originates from the teachings of Auguste Comte's Positivism has a big influence in the development of legal science. Great influence of positivism appeared in the teachings of John Austin (1790-1859) about the law. In his opinion the law should be concrete and tangible in written form, created by the institution that it has the legal authority for it. The institution in question is a state. Not just stopping there only: The concept of the state - in the view of John Austin - is still abstract, so it must be conc-

reted. Concretization of the state indicated by the state attribute of sovereignty. Based on its sovereignty then a state can make the rule of law. In the inter-state, countries develop international law, while inside the state, a country has an authority to compile national law. John Austin calls it with the words: that in the context of law, sovereignty has an external aspect (as embodied in international law) and the internal aspect (as embodied in positive law in force in the country). John Austin introduced the term *Analytical Jurisprudence* to refer to the legal doctrine that was developed from the school of positivism. The term *Analytical Jurisprudence* indicating a proficiency in law science limits, which must be removed from the study of metaphysics. Furthermore, he said, the period of the late nineteenth century was marked by a *modern legal scientification*.

Influence of positivism in law (*Jurisprudence*) later gave birth to the so-called *school of Jurisprudence: formalism or conceptualism*. In the article titled: *Jurisprudence: An Overview*, published by Law School Cornell University in 2004 stated:

"... Formalism or conceptualism, treats law like math or science. Formalist believe that a judge identifies the relevant legal principles, applies them to the facts of a case, and logically deduces a rule that will govern the outcome of the dispute ... "

The statement reflects the application of natural sciences positivism thought into the science of law. Positivist thinking in the law as such has created School of Jurisprudence, called formalism or conceptualism, which believes that in dealing with a case, the judge will identify the legal principles that are relevant, and will apply them deductively, so that the provisions of this law will lead to litigation settlement . So the formalism is the School of Jurisprudence, developed from the theory of Jurisprudence in the positivist tradition, as stated by Herman J. Pietersen (2004): "... Another, related, theory of Jurisprudence in the positivist tradition is the so-called approach of legal formalism". Similar to the description issued by Law School Cornell

University, Herman J. Pietersen also stated:

“... The chief purpose of legal formalism is to build a comprehensive and tight (“seamless”) body of legal principles, propositions and justificatory structures that can be applied to legal practice in the manner of a logical - deductive science like mathematics, but without recourse to any non-legal disciplines such as philosophy or social science ...”.

Based on the opinion of Herman J. Pietersen then the main purpose of legal formalism is to build legal principles, propositions and justificatory structures that comprehensive and rigorous, so it can be applied to practice law in a way (method) of deductive logic natural science, without the help of other discipline sciences such as philosophy or social science.

In nineteenth-century legal science also experiencing tremendous growth, which has never experienced before. Legal fields were growing, especially in the field of trade. Legislation achieved a large magnitude, so need to be systematically arranged that produce codifications. These developments confirmed the nature of legal science as an analytical jurisprudence. In the analytical jurisprudence, all intellectual activity has one characteristic that is not allowed out of the realm of positive law.

In the realm of legal formalism, law conceived primarily as a means of social control to ensure certainty for behavior is always fixed and predictable (logic normologic). So the main study is motivated to set (to regulate). Legal norms then become a justification or repellent behavior or in other words, legal norms used to justify whether a fact has legitimate basis or not. On that basis, the pattern of thinking that used to do research is deductive syllogism (Soetandyo Wignjosoebroto, 2000).

Furthermore, the legal doctrines developed from the paradigm of positivism became so dominant in practice and in legal education. Legal doctrines that were inspired by the paradigm of legal positivism is neutral, impartial, impersonal and objective with

derivations in the principle of equality before the law for example, become a doctrine that can not be denied its validity and become an integral part in legal education materials (including in Indonesia). The development of legal doctrine in the “umbrella” positivism paradigm is expected to be producing legal actors to maintain neutrality, impartiality and objectivity, so it is assumed the law would be fair.

In this context, the tasks of legal education are merely maintain the purity of these legal doctrines, and produce legal practitioners who are able to apply rules based on the doctrines of neutrality, impartiality and objectivity of the law. Legal education, thus more likely to produce professional practitioners. The resulting legal practitioners are legal actors who are expected to make a decision which side is wrong and what is right under the provisions of the law.

3. Modern Law Scientification: An Overview

From the above description it can be concluded that the modern law scientification is strongly influenced by the emergence of positivism paradigm in modern science. Modernity is not just affecting science and technology, but also become a source of change in people's lives, and also the sociology science. At present, along with the complexity of the problems of people and society, the main character of modern law is a rational nature. Rationality is characterized by the nature of a procedural rule of law. Procedure, thereby becoming an important legal basis to establish what is called justice, even the procedure becomes more important than talking about justice itself. In this context the search for justice could be a failure just because knock violation of procedure. “All the handling of the case shall be in accordance with applicable legal procedures,” according to the expression that represents how important procedure to ensure the rationality of law. Instead all forms of another effort to seek the truth in an effort to uphold justice, outside the rules applicable law, can not be accepted and considered as out of legal thought, even

illegal.

In the modern legal system, *justice* has been considered to be given by making positive law. However, in practice, the use of positivism paradigm in modern law was also generated a lot of stiffness in such a way that *searching for the truth* and *searching for justice* was not achieved because of blocked by the "walls" procedural.

The lesson to be drawn is that the *formal justice* upheld by positive law (the legislation) in Indonesia, which is said to uphold the principles of *rule of law* was not yet able to achieve substantial justice. Efforts to achieve *substantial justice* could fail due to hit the procedures that must be met in fulfilling the legality of a modern legal system. Through legislation, certain parties may damage conscience or common sense that is *genuine* behind the statement "all shall be in accordance with legal procedures", but when the legal procedure is executed, it turns out the fulfillment of justice can be blocked by procedures or formalities which was created by modern law itself. The term of law supremacy then identified with the supremacy of legislation. As a result of legal issues is reduced to a mere juridical technical skills problems. Furthermore, for professional interests there was a *sacred* of positive law. It should be maintained for reasons of the rule of law, even if it had shackles Indonesia in fecklessness uncover cases that led Indonesia to the deterioration of national ethics.

4. Conclusion

Clinical Legal Education (CLE) is an education in legal study that aims to provide knowledge on practical expertise that aims to make law graduates capable of providing legal services (legal advocacy). CLE become important in recent days because of the tendency to resolve the matter through legal channels is increasing. But in fact, it shows that law enforcement is almost interpreted only as rule enforcement. The trend that happens, aspects of compliance procedures take precedence over justice.

Through the description that mentioned above, thus in CLE should be avoided

the understanding that in law enforcement, the embodiment of justice is much more important than compliance procedures. Formal justice is enforced through the fulfillment of the legal procedures should still be able to bring about justice that can be received through common sense. In the CLE, the term supremacy of law should not be identified with the supremacy of regulations, because it raises a result, the law would be reduced to technical skills juridical issues. It was to be avoided in the CLE. Based on these understandings beyond, it is expected CLE will produce law graduates that are not just as a guard of Act or rule of law, but also a man that committed to justice who are able to balance between the interests of individuals with a common interest.

References

- Assidique, Jimly, dan Ali Syafa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Atkinson, Sam (editor), 2013, *The Politics Book*, Dorling Kindersley Limited, London
- Bacon, Francis, 1958, *The Advancement of Learning*, (last reprinted), London, J.M Dent and Sons Ltd
- Commins, Saxe, and Robert N. Linscott (editor), 1954, *The Speculative Philosophers*, New York, Published by Pocket Books
- Carvey, James, 2006, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), 2010, Kanisius, Yogyakarta
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif ; Prinsip-Prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum Dan Politik*, Bandung, Nusa Media
- Kleinman, Paul, 2013, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics, an Essential Primer on the History of Thought*, Massachuset, Published by Adam Media
- Landau, Cecile, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), 2011, *The Philosophy Book*, Dorling Kindersley Limited, London
- Law, Stephen, 2007, *The Great Philosophers*, Great Britain, Quercus
- Osborne, Richard, 2001, *Philosophy for Beginners*, 1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), Kanisius, Yogyakarta

Effect of Positivism in Clinical Legal Education

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

seminar.ums.ac.id

Internet Source

3%

2

www.iiste.org

Internet Source

2%

3

examinedlifejournal.com

Internet Source

2%

4

Submitted to UNIVERSITY OF LUSAKA

Student Paper

1%

5

journal.univpancasila.ac.id

Internet Source

1%

6

www.neliti.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Effect of Positivism in Clinical Legal Education

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/76

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5
